

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari 14 kabupaten/kota dengan total keseluruhan penduduk 5,41 juta jiwa hasil dari sensus penduduk tahun 2020. Kalimantan Barat dianugerahi sumber daya alam yang melimpah yang seharusnya dapat menyokong kesejahteraan setiap penduduknya. Namun realitanya Kalimantan Barat tidak luput dari masalah kemiskinan..

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang telah menjadi fenomena klasik dan terus menjadi topic hangat dalam diskusi dikarenakan kemiskinan merupakan masalah global dan lintas sektor yang dipengaruhi berbagai variabel yang terikat satu dengan yang lainnya terutama faktor sosial-ekonomi. Kemiskinan tidak hanya sebatas tidak mampu dalam segi ekonomi, tetapi juga dalam mencakup hak-hak dasar serta diskriminasi dalam menerima perlakuan bagi individu maupun kelompok. Fokus kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah penduduk miskin tetapi ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan yakni Kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Faktor kedalaman dan keparahan kemiskinan merupakan dua faktor penting yang harus diperhatikan ketika membahas masalah kemiskinan.

Tabel 1. Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kab/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota Kalimantan Barat					Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota Kalimantan Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	1,30	1,23	1,18	1,14	1,01	0,31	0,29	0,28	0,26	0,23
Sambas	1,30	1,05	1,02	1,28	0,83	0,30	0,24	0,21	0,27	0,16
Bengkayang	1,26	0,94	0,69	1,22	1,06	0,28	0,17	0,11	0,28	0,24
Landak	1,88	1,88	1,82	1,71	1,54	0,35	0,50	0,46	0,38	0,38
Mempawah	0,49	0,65	0,86	0,80	0,41	0,07	0,14	0,25	0,17	0,05
Sanggau	0,74	0,49	0,51	0,48	0,82	0,16	0,09	0,09	0,09	0,21
Ketapang	1,90	1,63	2,00	1,51	1,61	0,50	0,40	0,64	0,37	0,39
Sintang	1,24	1,49	2,16	1,32	1,03	0,26	0,34	0,58	0,26	0,19
Kapuas Hulu	1,43	1,28	1,34	0,94	1,52	0,34	0,27	0,29	0,17	0,35
Sekadau	1,02	1,03	0,53	0,50	0,58	0,22	0,26	0,08	0,07	0,10
Melawi	2,14	2,06	2,00	2,24	1,63	0,57	0,50	0,50	0,60	0,40
Kayong Utara	1,71	1,55	1,47	1,69	1,13	0,45	0,38	0,32	0,42	0,22
Kubu Raya	0,75	0,83	0,63	0,75	0,62	0,17	0,21	0,14	0,17	0,14
Kota Pontianak	0,71	1,01	0,62	0,70	0,50	0,16	0,35	0,14	0,16	0,09
Kota Singkawang	0,66	0,73	0,70	0,53	0,48	0,14	0,17	0,18	0,10	0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2020

Dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten/kota di Kalimantan Barat bervariasi. Namun dapat dikatakan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di setiap wilayah mengalami penurunan dari tahun 2016-2020. Yang memperlihatkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang mulai mendekati garis kemiskinan yang mana rawan menjadi miskin ketika terjadi pergolakan kemiskinan.

Tingkat keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuatif. Namun secara keseluruhan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan yang mengindikasikan terjadi penurunan ketimpangan. Meskipun mengalami penurunan, indeks keparahan kemiskinan memiliki gap yang cukup terlihat di setiap daerah yang menunjukkan bahwa jurang kemiskinan yang dialami setiap wilayah masih tinggi. Bahkan di beberapa daerah indeks keparahan kemiskinan lebih besar dibandingkan indeks keparahan kemiskinan rata-rata di provinsi Kalimantan Barat. Dalam pembangunan maupun penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari beberapa variabel yang mempengaruhi. Diantaranya ialah pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Kalimantan Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	4,13	4,36	4,26	4,45	5,81
Sambas	4,24	4,24	3,34	3,58	3,71
Bengkayang	2,4	2,4	2,4	2,71	3,91
Landak	2,03	2,03	2,29	2,75	3,38
Mempawah	6,72	6,72	6,87	5,19	7,55
Sanggau	3,27	3,27	2,47	3,07	3,52
Ketapang	3,97	3,97	3,23	4,53	7,3
Sintang	1,93	1,93	2,34	3,2	4,5
Kapuas Hulu	2,21	2,21	1,58	2,46	4,02
Sekadau	0,64	0,64	2,8	3,14	3,39
Melawi	2,11	2,11	3,15	2,45	2,7
Kayong Utara	5	5	3,93	4	3,71
Kubu Raya	5,91	5,91	5,04	5,62	7,14
Kota Pontianak	9,36	9,36	10,37	9,13	12,36
Kota Singkawang	8,08	8,08	7,88	6,44	8,78

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Kalimantan Barat dapat dikategorikan masih tinggi. Persentase pengangguran terbuka di Kalimantan Barat terus meningkat selama 5 periode terakhir dihitung dari tahun 2016-2020. Bahkan di tahun 2020 persentase pengangguran terbuka provinsi mencapai 5.81%. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi di kota Pontianak pada tahun 2020 sebesar 12.36% kemudian disusul kota Singkawang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,78% . Secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota mengalami fluktuatif. Terus meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kalimantan Barat menjadi masalah serius dalam pemerintahan. Masalah pengangguran terbuka tidak hanya persoalan pendapatan tetapi akan menimbulkan masalah baru yakni meningkatnya angka kriminalitas, penurunan pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pembangunan nasional.

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota Kalimantan barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66
Sambas	64,94	65,92	66,61	67,02	67,03
Bengkayang	65,45	65,99	66,85	67,57	67,87
Landak	64,58	64,93	65,45	65,96	65,98
Mempawah	63,84	64	64,9	65,5	65,74
Sanggau	63,9	64,61	65,15	65,67	65,77
Ketapang	64,74	65,71	66,41	67,16	67,17
Sintang	64,78	65,16	66,07	66,7	66,88
Kapuas Hulu	63,83	64,18	65,03	65,65	65,69
Sekadau	62,52	63,04	63,69	64,34	64,76
Melawi	64,25	64,43	65,05	65,54	65,55
Kayong Utara	60,87	61,52	61,82	62,66	62,68
Kubu Raya	65,54	66,31	67,23	67,76	67,95
Kota Pontianak	77,63	77,93	78,56	79,35	79,44
Kota Singkawang	70,1	70,25	71,08	71,72	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan kenaikan dalam kurun waktu 5 periode terhitung dari tahun 2016 - 2020 dengan rata-rata berada pada presentasi diatas 65%. Namun persentase Indeks Pembangunan Manusia tergolong rendah jika dibandingkan provinsi lainnya serta rata-rata nasional yang berada pada angka lebih dari 70%. Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dimiliki oleh kota pontianak sebesar 79,44% diikuti oleh kota singkawang sebesar 71,94% . Hal ini menunjukkan bahwa perlunya perhatian dari berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai modal awal untuk membangun kesejahteraan dan kemandirian provinsi.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat (%)

Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi Kab/ Kota Kalimantan Barat				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	5,2	5,17	5,06	5	-1,82
Sambas	5,24	5,13	5,1	4,89	-2,02
Bengkayang	5,15	5,66	5,37	5,23	-1,99
Landak	5,28	5,21	5,12	5,01	-0,67
Mempawah	5,99	5,93	5,87	5,81	0,19
Sanggau	5,34	4,5	4,47	4,3	0,7
Ketapang	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,5
Sintang	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19
Kapuas Hulu	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43
Sekadau	5,93	5,85	5,88	4,49	-0,98
Melawi	4,79	4,79	5,44	4,97	-1,1
Kayong Utara	5,98	5,42	5,02	5,04	-0,74
Kubu Raya	6,37	6,56	5,49	5,82	-2,43
Kota Pontianak	5,08	5,05	5,03	4,81	-3,97
Kota Singkawang	5,17	5,47	4,71	4,53	-2,43

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Pertumbuhan ekonomi rata-rata Kalimantan Barat tergolong tinggi yakni tumbuh diatas 5% setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2020 yang turun menjadi -1.82%. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang cukup baik. Bahkan, di beberapa wilayah mengalami pertumbuhan melebihi pertumbuhan rata-rata provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten mempawah dan sanggau merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik bahkan di tahun 2020 kedua wilayah ini masih mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 0,19% dan 0,70%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi semestinya dapat mencerminkan keadaan ekonomi yang baik dengan kondisi kemiskinan yang rendah. Akan tetapi tingginya pertumbuhan ekonomi belum cukup mampu menurunkan angka kemiskinan. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat akan tetapi indeks keparahan kemiskinan kabupaten ketapang juga menjadi yang tertinggi yang menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Ini menyatakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Apakah Pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kedalaman Kemiskinan 2) Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kemiskinan 3) Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kemiskinan 4) Apakah Pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat keparahan kemiskinan 5) Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat keparahan kemiskinan 6) Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kedalaman kemiskinan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu :1) menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap kedalaman kemiskinan 2) menguji dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan terhadap kedalaman kemiskinan 3) menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kedalaman kemiskinan 4) menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap keparahan kemiskinan 5)

menguji dan menganalisis indeks pembangunan manusia terhadap keparahan kemiskinan 6) menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap keparahan kemiskinan.

2. KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan dalam pengertian proper didefinisikan sebagai kondisi kekurangan barang atau uang sebagai jaminan kelangsungan hidup. (Husnah, dan Muhammad, 2017). Menurut Baidhawiy mengutip dari Kerba (1996) meninjau empat macam teori kemiskinan. pertama, teori sosial Darwin yang mencoba menjelaskan kemiskinan dari segi perilaku dari sikap individu miskin tersebut. Individu miskin akan menjadi miskin disebabkan mereka tidak bekerja dan cenderung menggunakan uang dengan b Kedua, budaya kemiskinan oleh Oscar Lewis dimana kemiskinan terjadi dikarenakan adat, budaya maupun sikap dari setiap anggota masyarakat yang menjadikan mereka menjadi miskin. Ketiga, teori kemiskinan situasional dimana dalam teori ini meyakini bahwa individu miskin memiliki perilaku yang berbeda dikarenakan terbatasnya sumber daya serta kesempatan dalam mengikuti gaya hidup individu kelas atas. Keempat, teori kemiskinan struktural yang mempercayai bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya struktur sosial ekonomi yang lebih luas, yakni struktur makro masyarakat yang berkaitan lahirnya ketimpangan dan kemiskinan. struktur kapitalisme global yang menjurus pada kesenjangan sosial.

Menurut Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan akan selalu terhubung dengan ketimpangan kerentanan dikarenakan individu yang tidak miskin akan menjadi miskin sewaktu-waktu terjadi masalah seperti krisis ekonomi. Sukirno (2010) menjelaskan bahwa kesenjangan merujuk pada standar hidup relatif dari seluruh penduduk karena kesenjangan antar wilayah disebabkan adanya faktor anugrah awal (endowment factor). Kuncoro (2006) menyatakan bahwa batas garis yang digunakan oleh setiap negara berbeda-beda dikarenakan perbedaan lokasi dan standar kebutuhan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan rata-rata dari ketidakseimbangan pengeluaran kemiskinan atas garis kemiskinan. tingginya nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata masyarakat tidak mampu semakin menjauhi kemiskinan dan apabila indeks kedalaman kemiskinan semakin rendah maka rata-rata masyarakat tidak mampu mulai mendekati garis kemiskinan. sementara indeks keparahan kemiskinan adalah sketsa penyebaran pengeluaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak mampu. Rendahnya nilai indeks akan diikuti rendahnya ketimpangan pengeluaran masyarakat tidak mampu, sebaliknya tingginya nilai indeks maka ketimpangan pengeluaran masyarakat miskin akan tinggi.

2.1. Hubungan Antara Pengangguran Terbuka Terhadap Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan

Sukirno (2004) menyatakan bahwa pengangguran terbuka berdampak secara langsung terhadap kemiskinan dikarenakan mempengaruhi pendapatan yang mana berkaitan langsung dengan kemampuan dasar individu maupun kelompok. Semakin kesejahteraan menurun akibat menganggur semakin tinggi peluang individu terjatuh dalam kemiskinan akibat tidak memiliki pendapatan. Ukpere & Slabbert (2009) menyatakan bahwa pengangguran mengakibatkan meningkatnya tingkat ketimpangan antar masyarakat. Hukum Okun menyatakan bahwa pengangguran menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan. Karl Mark mengemukakan bahwa pada tahap awal pembangunan akan mengalami kenaikan tenaga kerja. Kenaikan permintaan tenaga kerja akan diikuti naiknya tingkat upah yang mana akan mempengaruhi